

Katalog : 4601006.73

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

Nomor Publikasi : 73520.1802
Katalog : 4601006.73
Ukuran Booklet : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : ii+18 halaman

Penulis/Penyusun :

Ir. Sukardi M. Nur
Dessy Natalia, SST

Penyunting :

Dr. Faharuddin, M.Si

Gambar Kulit :

Lintasterkini.com 20 Mei 2017

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009 atas kerjasama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). IDI pertama kali dikembangkan pada 2007 diprakarsai Bappenas dan UNDP sebagai embrio pengukuran kinerja demokrasi. Mulai tahun 2009 hingga 2016 IDI dihitung dengan konsep dan metodologi yang sama sehingga dapat bermakna sebagai perubahan antar waktu.

IDI Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indeks yang dapat memberikan gambaran tentang realita kondisi demokrasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penyusunan IDI Provinsi yang dilakukan tiap tahun ditujukan untuk memberi manfaat bagi perencanaan pembangunan bidang politik pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Nursam Salam, SE

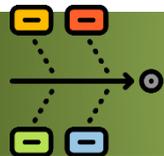


PENDAHULUAN

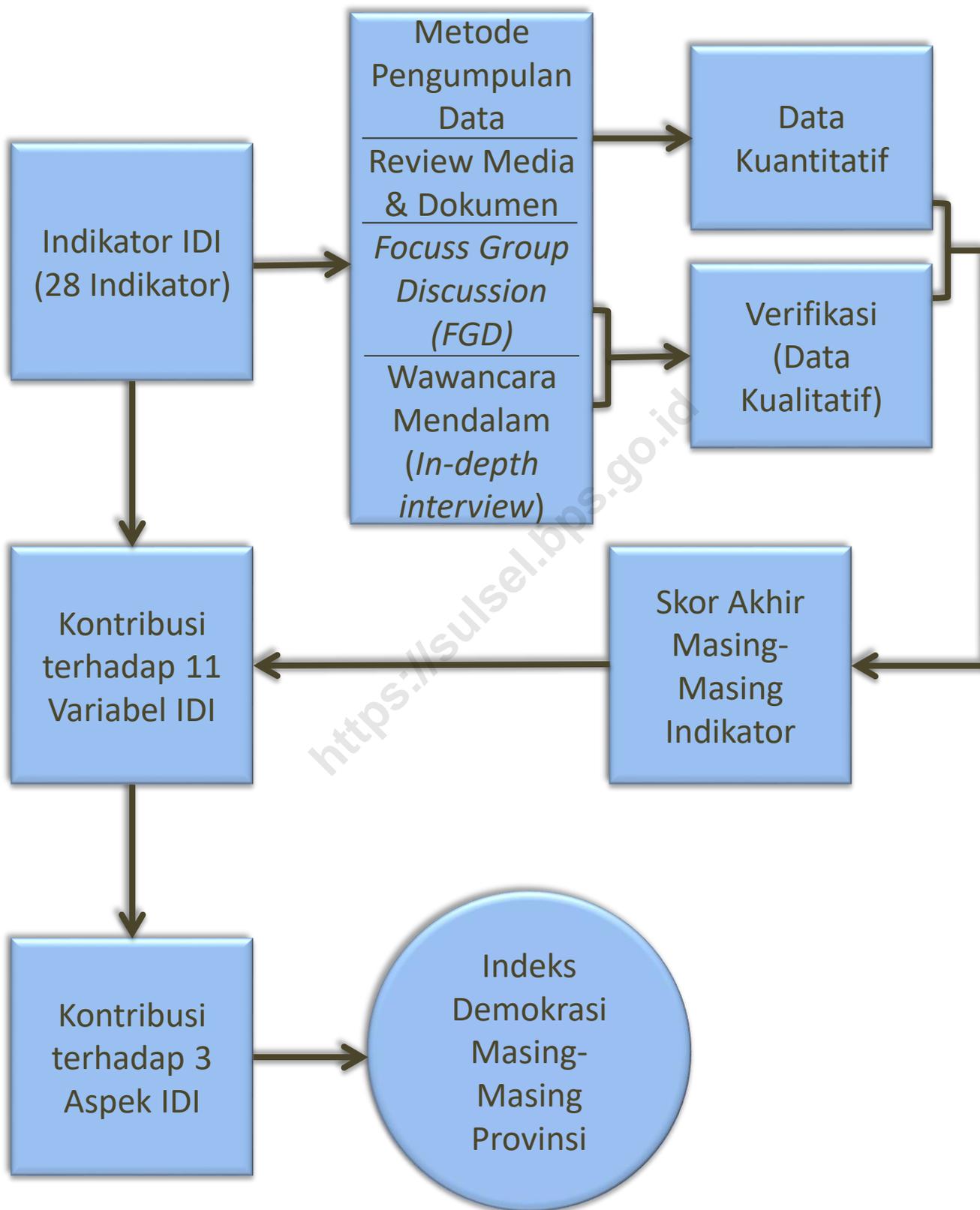
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Dalam penyusunan IDI ini, aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

IDI bertujuan untuk menguantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari hasil tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti. Dengan demikian, pengukuran ini akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi. Hasil akan bermanfaat untuk beberapa hal, *pertama*, hasil dari pengukuran IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. *Kedua*, bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, khususnya pada aspek atau variabel atau indikator yang masih kurang.

Data IDI mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi, dan bukan pada tingkat nasional. Oleh karena itu kata “Indonesia” mengacu pada rata-rata nilai provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan data pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tingkat provinsi menggunakan data pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut serta rakyat di provinsi bersangkutan sebagai sumber data.



ALUR PENYUSUNAN IDI





ASPEK DAN INDIKATOR IDI 2016

No	Aspek/Variabel/Indikator
A. KEBEBASAN SIPIL (<i>CIVIL LIBERTIES</i>)	
I. Kebebasan berkumpul dan berserikat	
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
II. Kebebasan berpendapat	
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
III. Kebebasan berkeyakinan	
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya
6	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
IV. Kebebasan dari diskriminasi	
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya



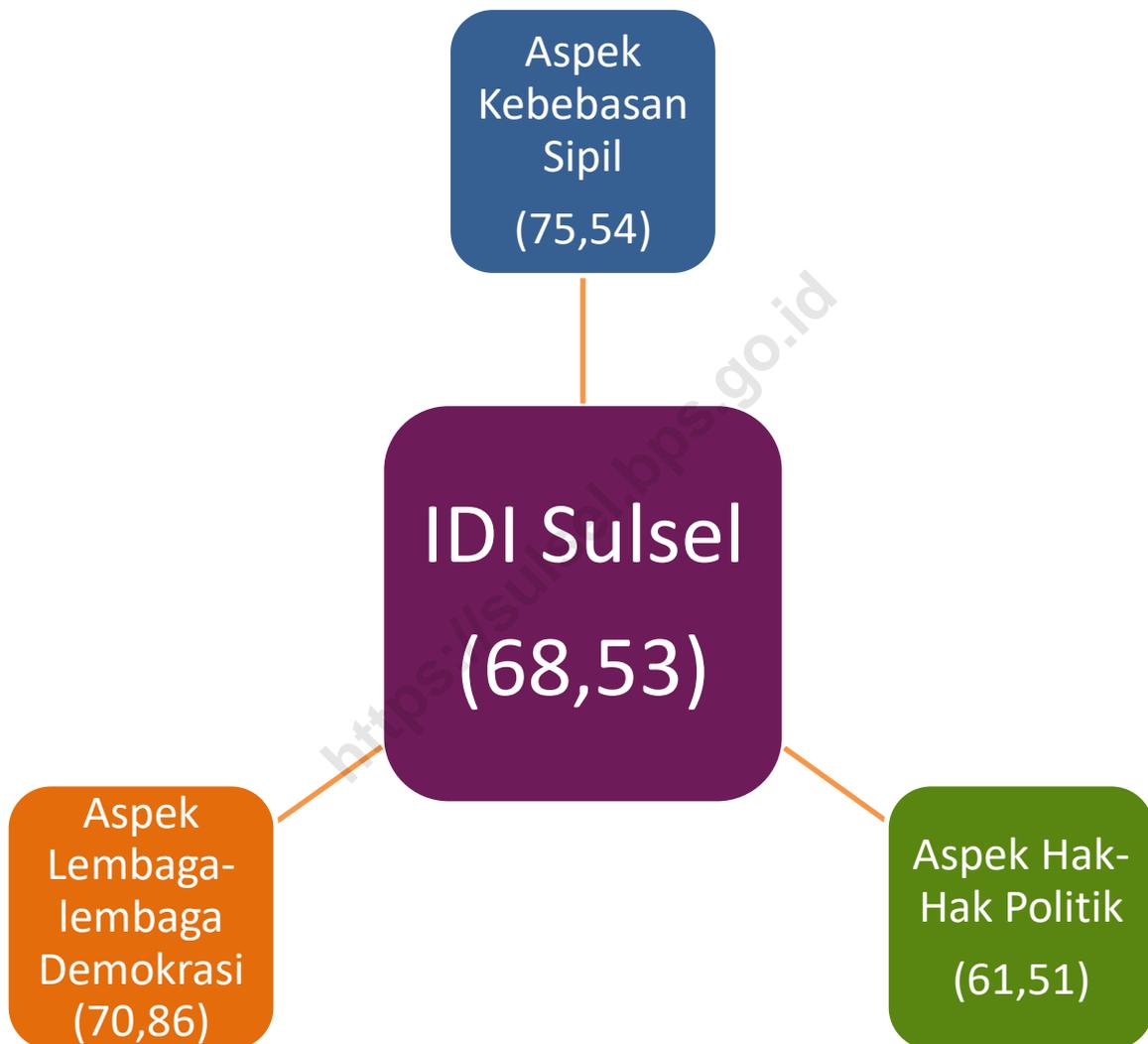


ASPEK DAN INDIKATOR IDI 2016

No	Aspek/Variabel/Indikator
B. HAK-HAK POLITIK (<i>POLITICAL RIGHTS</i>)	
V. Hak memilih dan dipilih	
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>Voters turnout</i>)
15	Perempuan terpilih di DPRD Provinsi
VI. Partisipasi Politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (<i>DEMOCRATIC INSTITUTIONS</i>)	
VII. Pemilu yang bebas dan adil	
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
VIII. Peran DPRD	
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
IX. Peran Partai Politik	
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
X. Peran birokrasi Pemerintah Daerah	
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
XI. Peran Peradilan yang independen	
27	Keputusan hakim yang kontroversial
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

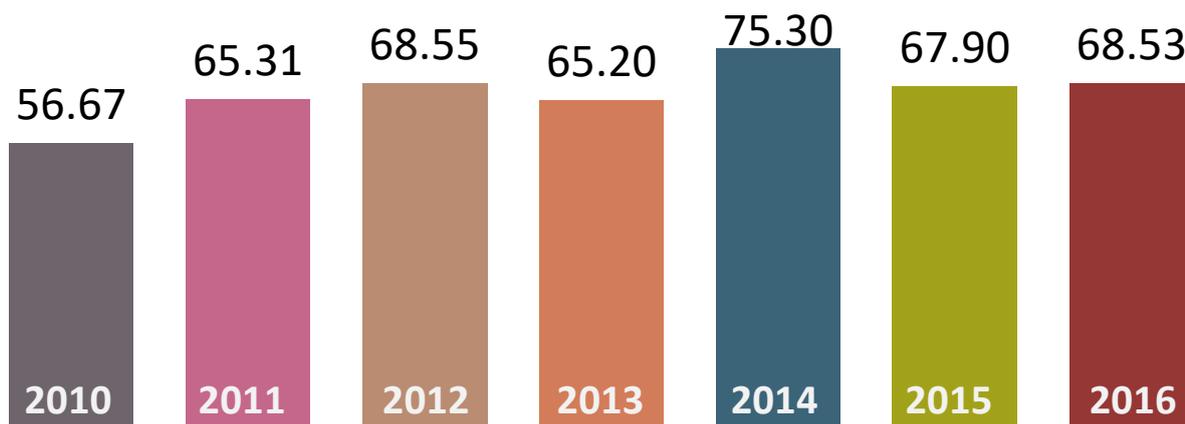


Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

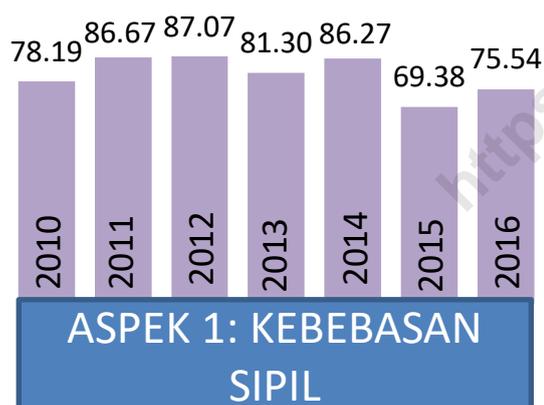




Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016



IDI PROVINSI SULAWESI SELATAN





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Angka IDI Sulawesi Selatan 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-Hak Politik, dan aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 sebesar **68,53** dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 0,63 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Sulawesi Selatan 2015 sebesar 67,90. Capaian kinerja demokrasi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “**sedang**”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Kenaikan IDI Sulawesi Selatan dari 2014-2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil naik 6,16 poin (dari 69,38 menjadi 75,54), Hak-Hak Politik yang turun 2,74 poin (dari 64,25 menjadi 61,51), dan aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi turun 0,98 poin (dari 71,84 menjadi 70,86).

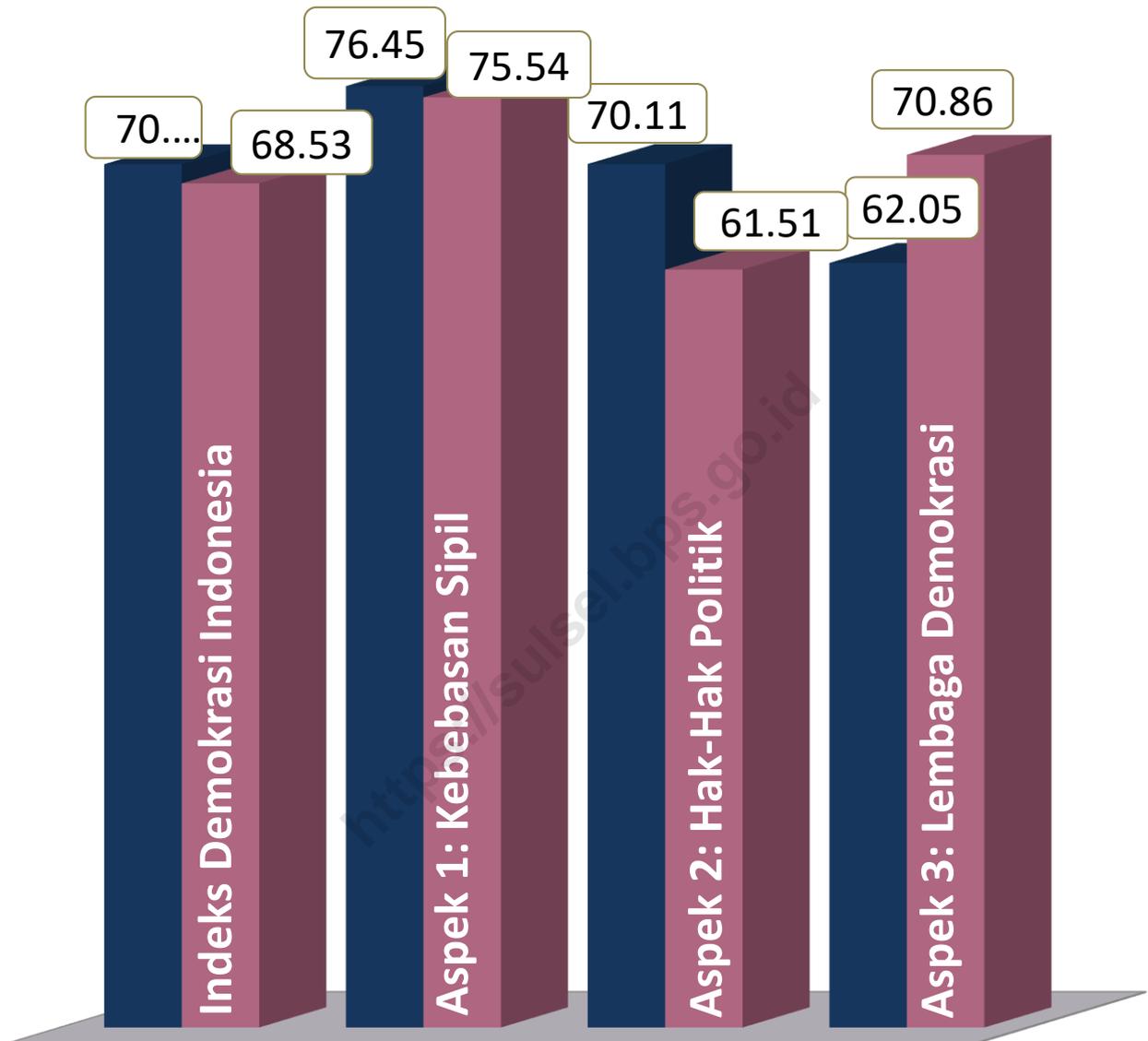
Pada tahun 2016 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks, satu variabel yang tetap dan tiga variabel yang mengalami penurunan. Dua variabel yang meningkat cukup berarti yaitu kebebasan berpendapat dan peran peradilan yang independen. Tiga variabel yang mengalami penurunan indeks adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, peran birokrasi Pemerintah Daerah sebesar, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sedangkan satu variabel yang tidak mengalami perubahan yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil.

Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.





Indeks Demokrasi Indonesia Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



 Nasional

 Sulawesi Selatan



Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Variabel Tahun 2015-2016

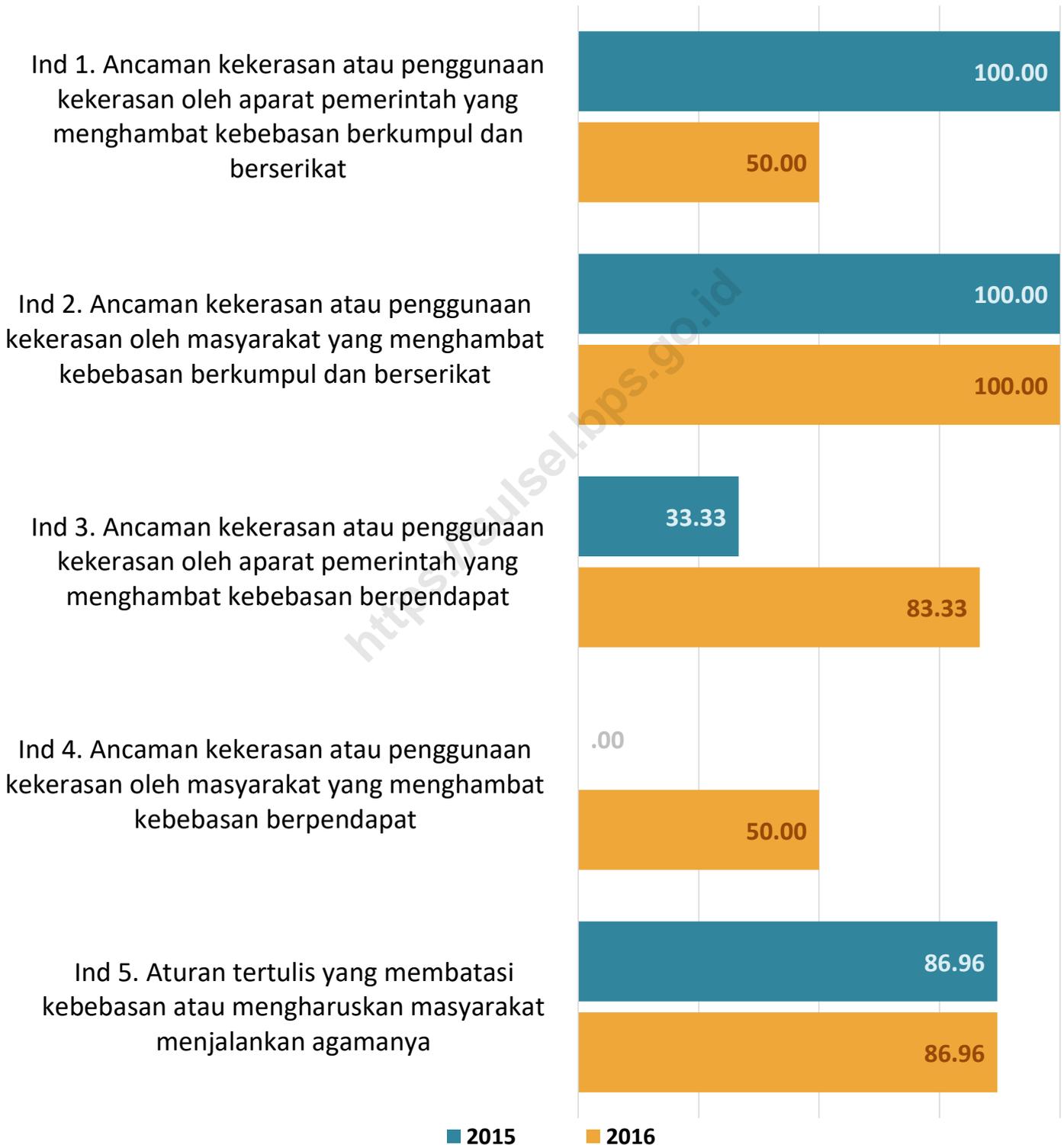
No	Nama Variabel	2015	2016	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	56,25	-43,75
2	Kebebasan Berpendapat	27,77	77,77	50,00
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,38	85,40	4,02
4	Kebebasan dari Diskriminasi	45,46	57,37	11,91
5	Hak Memilih dan Dipilih	78,49	79,17	0,68
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	43,85	-6,15
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	97,73	97,73	0,00
8	Peran DPRD	25,59	40,31	14,72
9	Peran Partai Politik	98,62	100,00	1,38
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	65,12	24,97	-40,15
11	Peran Peradilan yang Independen	78,13	100,00	21,87





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2015-2016

KEBEBASAN SIPIL₁





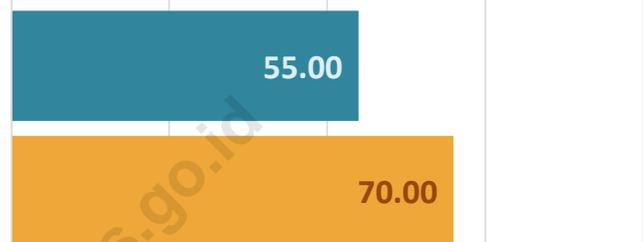
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2015-2016

KEBEBASAN SIPIL₂

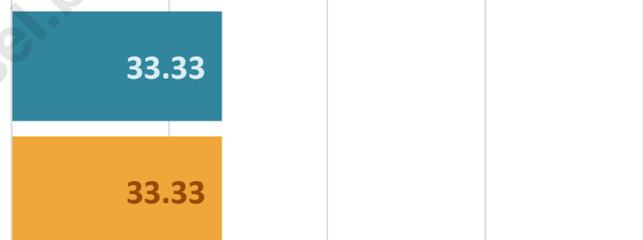
Ind 6. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya



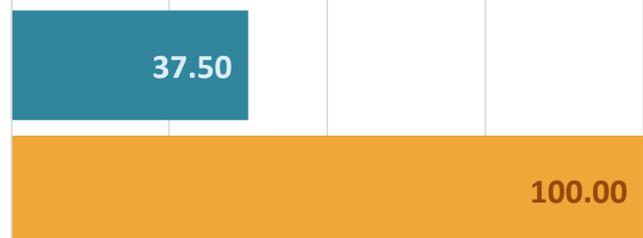
Ind 7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama



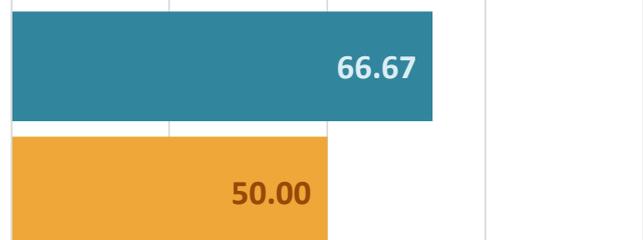
Ind 8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya



Ind 9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya



Ind 10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya



■ 2015

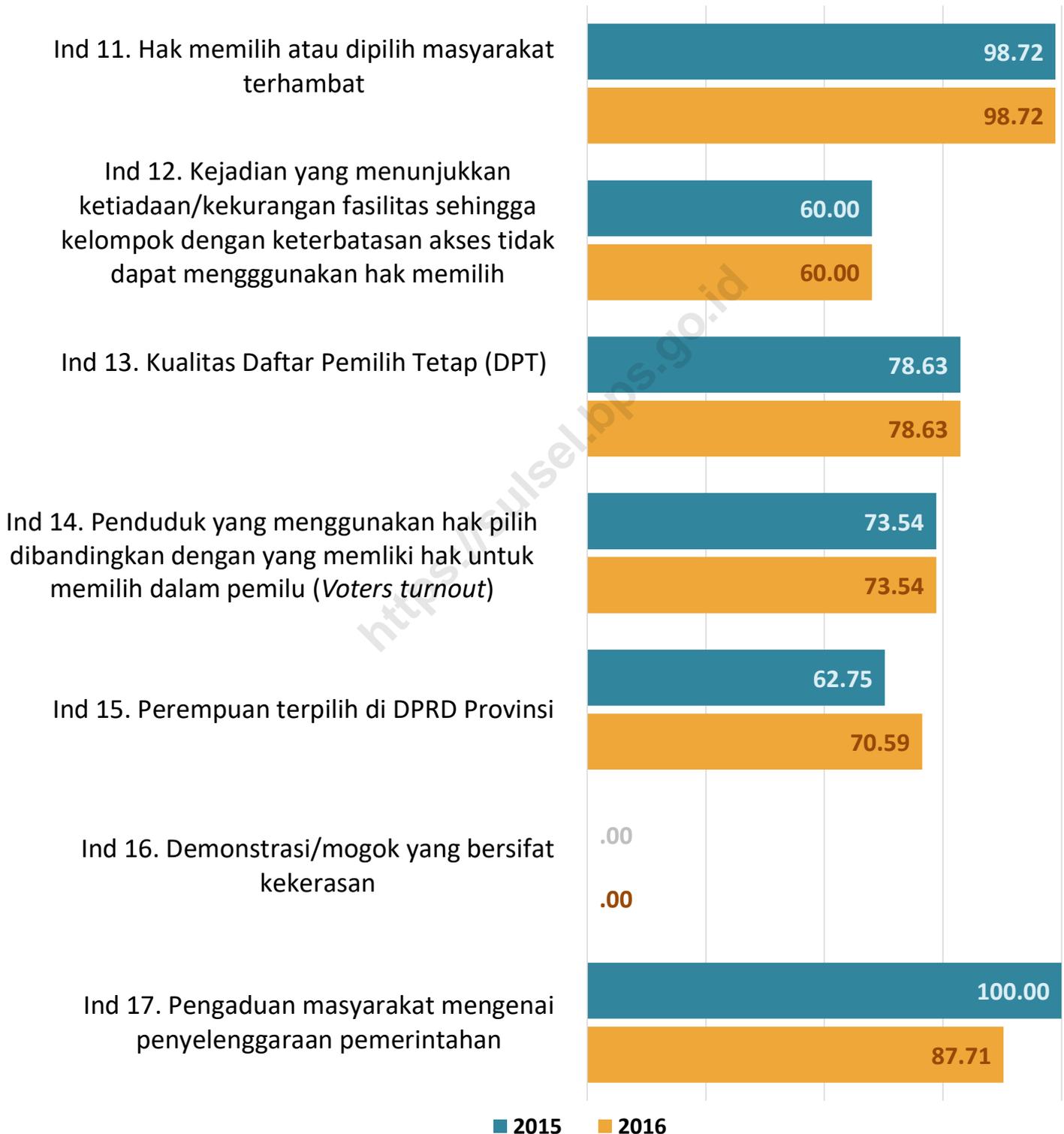
■ 2016





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2015-2016

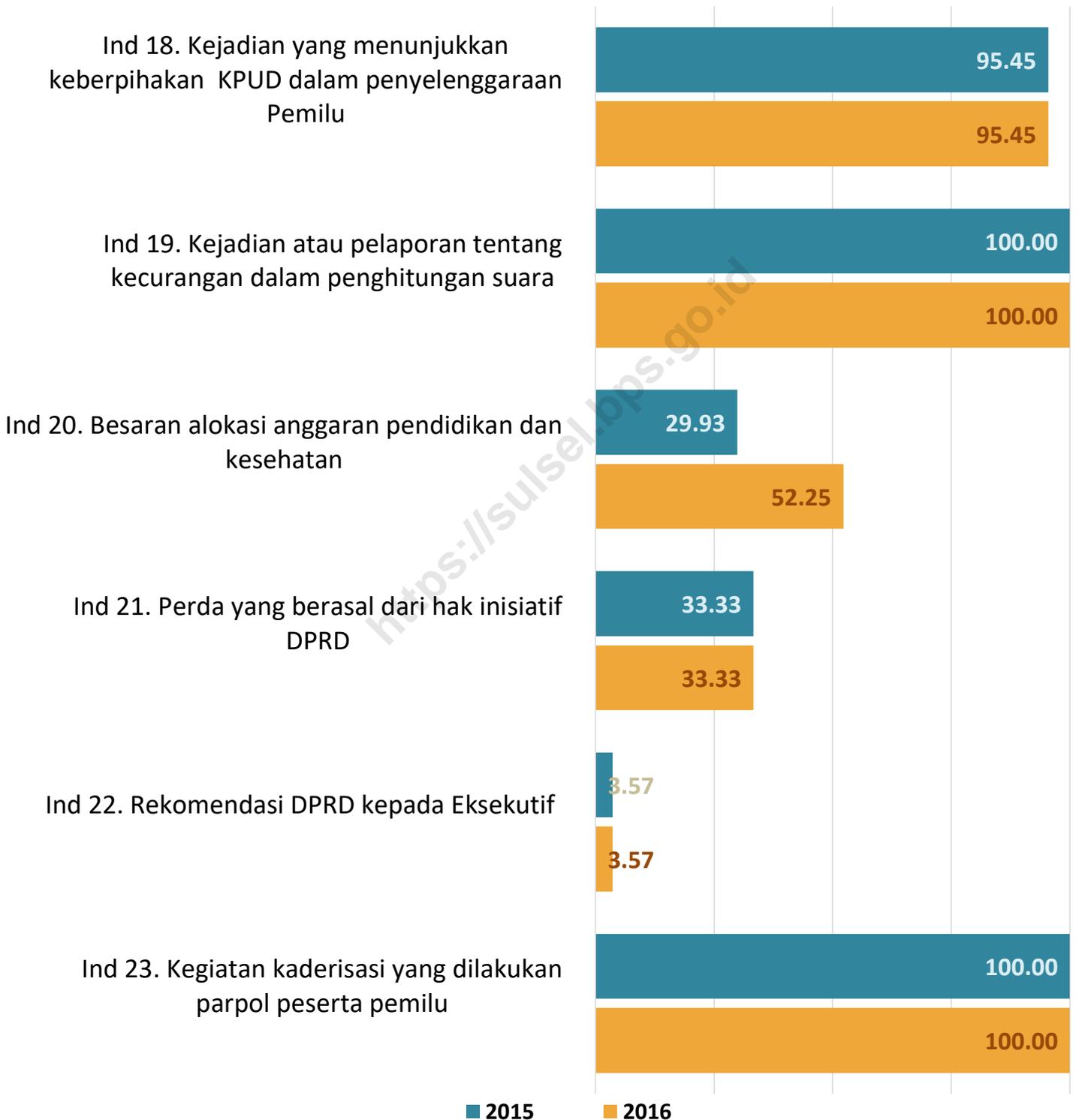
HAK-HAK POLITIK





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2015-2016

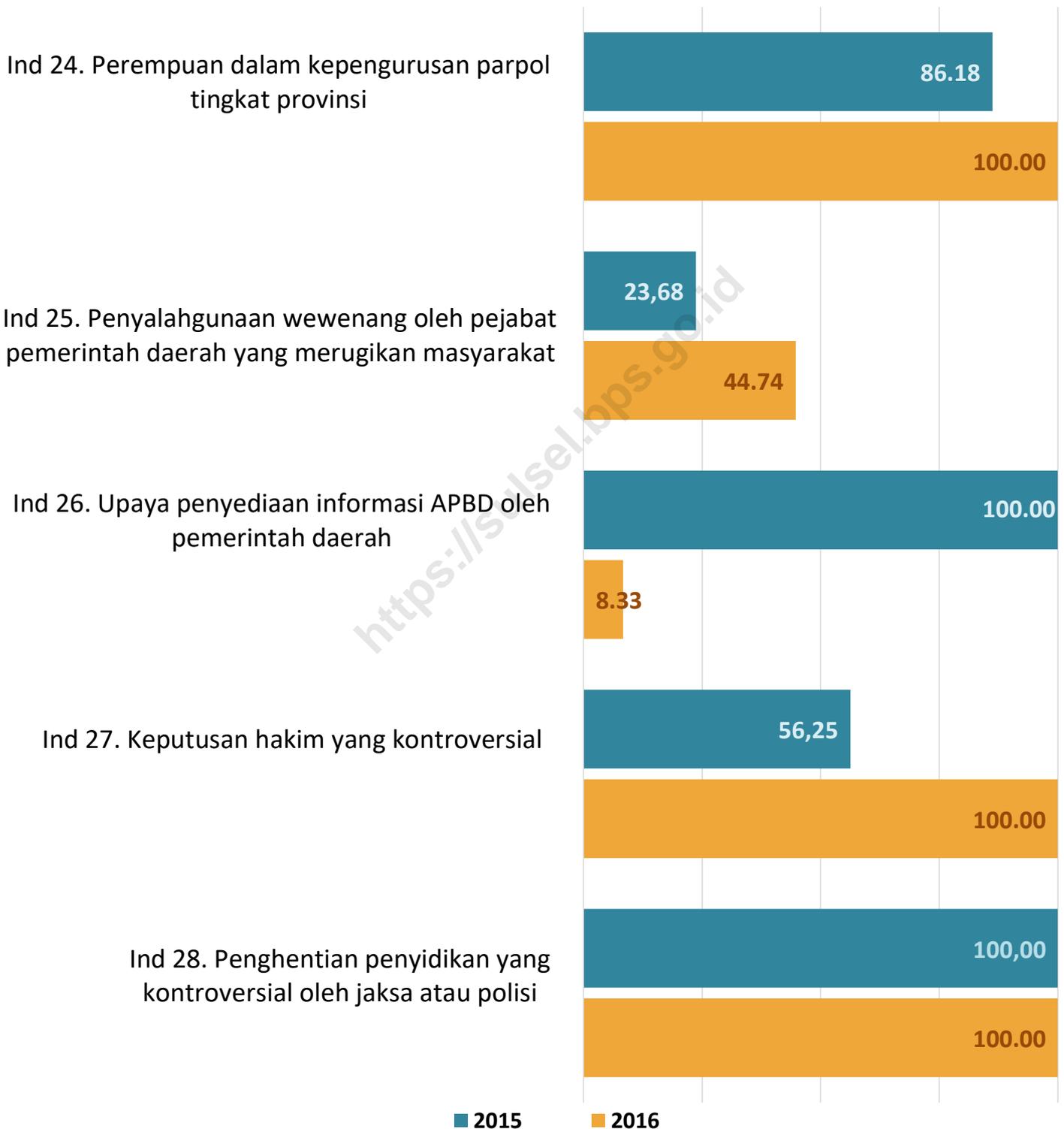
LEMBAGA DEMOKRASI₁





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2015-2016

LEMBAGA DEMOKRASI₂





Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2016

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

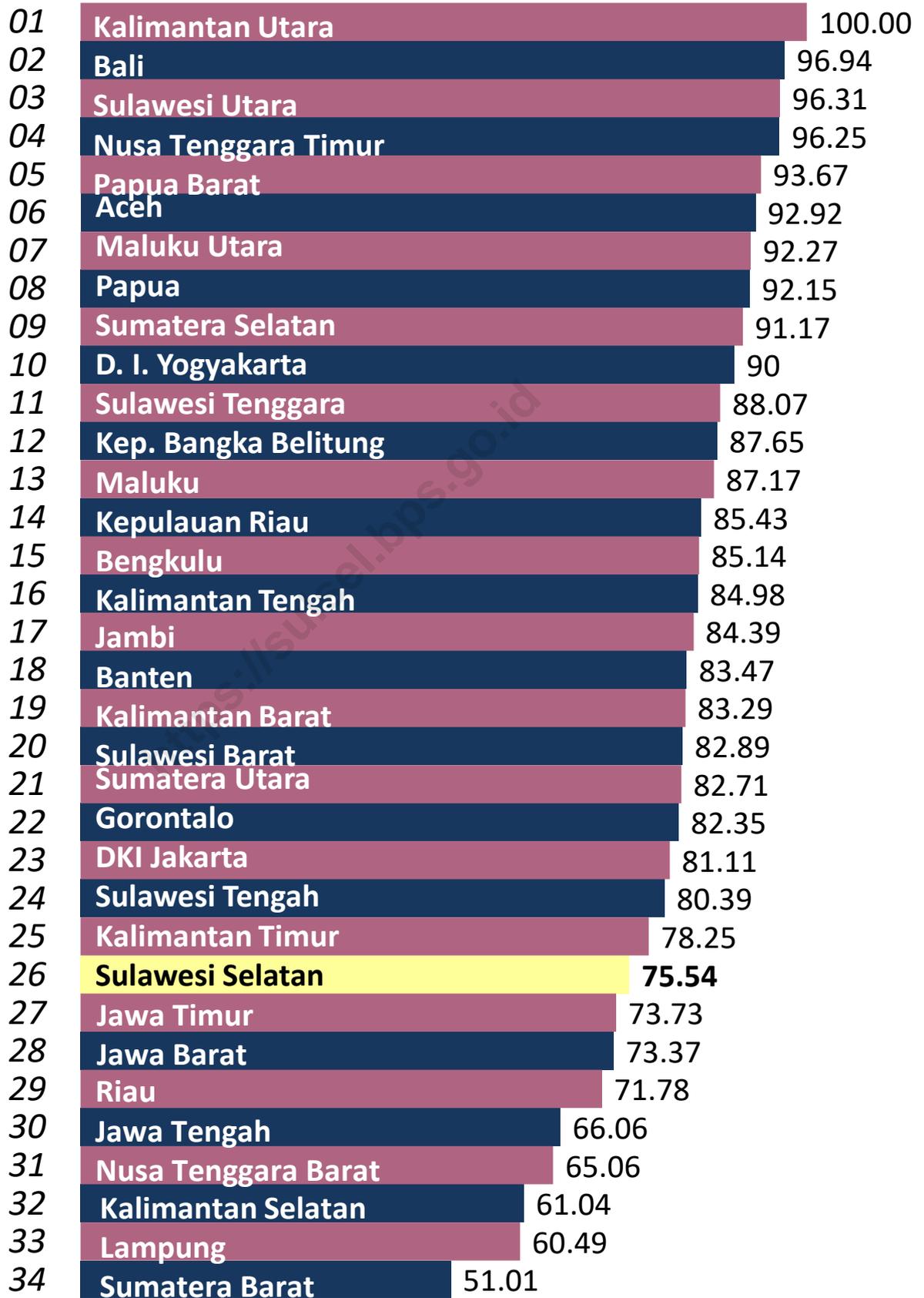
01	D.I. Yogyakarta	85.58
02	Kep. Bangka Belitung	83.00
03	Nusa Tenggara Timur	82.49
04	Sumatera Selatan	80.95
05	Bali	78.95
06	Maluku	78.2
07	Gorontalo	77.48
08	Kalimantan Utara	76.98
09	Sulawesi Utara	76.34
10	Kalimantan Barat	75.28
11	Kalimantan Tengah	74.77
12	Bengkulu	74.23
13	Kalimantan Timur	73.64
14	Kalimantan Selatan	73.43
15	Maluku Utara	73.27
16	Kepulauan Riau	72.84
17	Aceh	72.48
18	Sulawesi Barat	72.37
19	Jawa Timur	72.24
20	Sulawesi Tengah	72.2
21	Riau	71.89
22	Banten	71.36
23	Sulawesi Tenggara	71.13
24	DKI Jakarta	70.85
25	Jambi	68.89
26	Sulawesi Selatan	68.53
27	Sumatera Utara	67.37
28	Jawa Barat	66.82
29	Jawa Tengah	66.71
30	Nusa Tenggara Barat	65.41
31	Papua	61.02
32	Lampung	61
33	Papua Barat	60.35
34	Sumatera Barat	54.41





Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2016

ASPEK 1 : KEBEBASAN SIPIL



Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2016

ASPEK 2 : HAK-HAK POLITIK

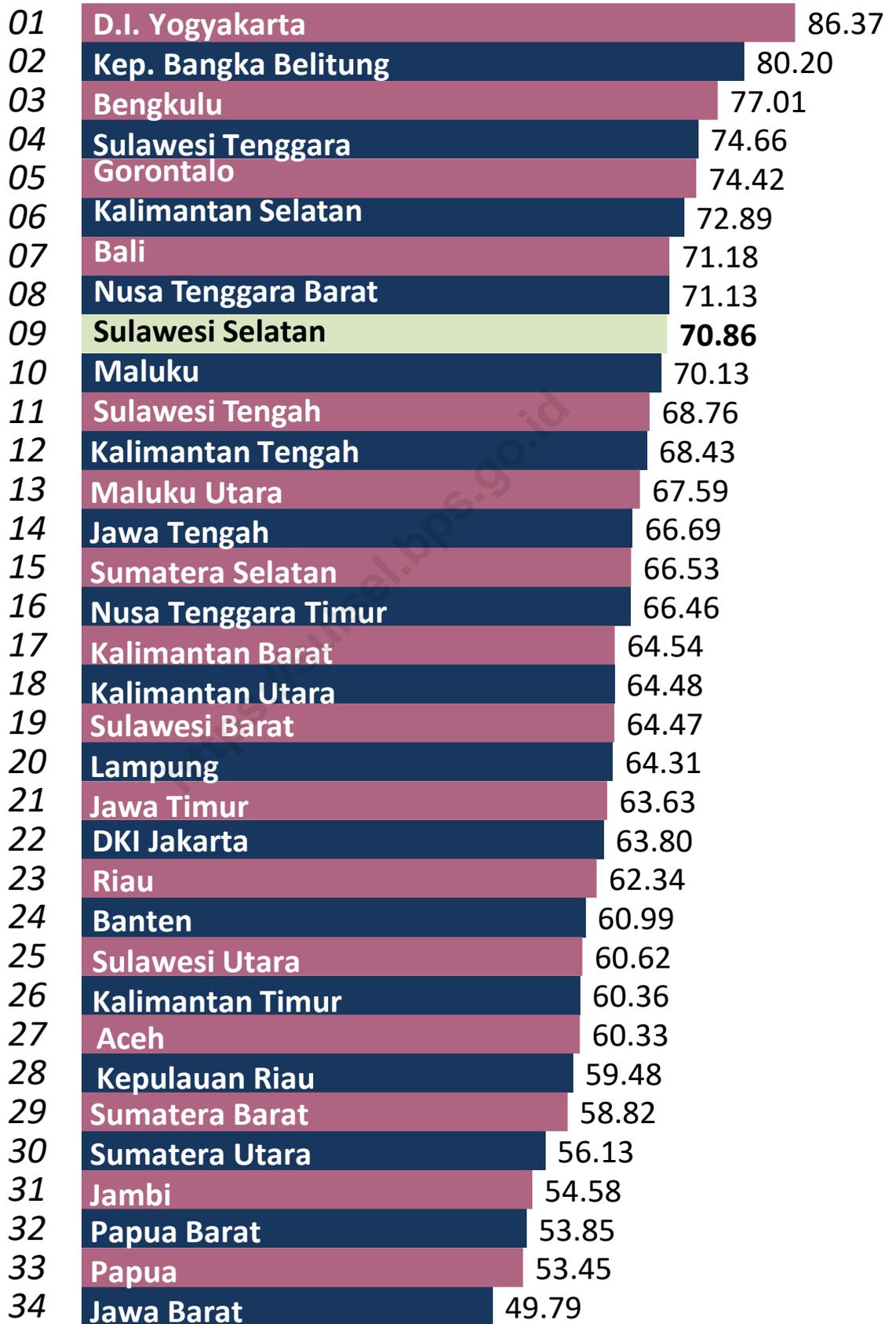
01	Kalimantan Selatan	83.58
02	Sumatera Selatan	81.94
03	Nusa Tenggara Timur	81.68
04	D.I. Yogyakarta	81.59
05	Kep. Bangka Belitung	81.09
06	Kalimantan Timur	78.35
07	Riau	77.98
08	Jawa Timur	76.49
09	Maluku	76.18
10	Kalimantan Barat	75.7
11	Gorontalo	75.54
12	Jawa Barat	72.34
13	Kepulauan Riau	71.28
14	Kalimantan Tengah	70.66
15	Sulawesi Utara	70.42
16	Bali	69.6
17	Sulawesi Barat	69.02
18	Banten	68.3
19	Sulawesi Tengah	67.89
20	DKI Jakarta	67.54
21	Jawa Tengah	67.24
22	Kalimantan Utara	66.64
23	Jambi	65.63
24	Aceh	63.94
25	Bengkulu	63.84
26	Sumatera Utara	62.29
27	Nusa Tenggara Barat	62.08
28	Maluku Utara	61.79
29	Sulawesi Selatan	61.51
30	Lampung	59.32
31	Sulawesi Tenggara	55.51
32	Sumatera Barat	54.33
33	Papua	41.13
34	Papua Barat	38.05





Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2016

ASPEK 3 : LEMBAGA DEMOKRASI



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Haji Bau No. 6, Makassar 90125

Telp (0411) 854838, 872879
